

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

6.1 Kesimpulan

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh karena berbagai hambatan baik eksternal maupun internal dalam perjalanan menuju pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang memiliki nilai ganda bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan sosial budaya masyarakat.

Sengketa kepemilikan tanah di kecamatan Muara Gembong sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Sepanjang persengketaan tanah masih mewarnai kehidupan masyarakat dan pemerintahan, sepanjang itu pula berbagai hambatan muncul dalam pelaksanaan investasi di bidang pariwisata maupun bidang pembangunan lainnya

Namun masalah tersebut tidak sepatasnya terus diperdebatkan tanpa adanya rasa saling pengertian oleh pihak-pihak yang bersengketa hingga dapat menghambat kemajuan bersama. Solusi terbaik saat ini adalah menggunakan metode *share holder* atau *win win solutions*, untuk mewujudkan Muara Gembong sebagai kawasan wisata bahari.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Muara Gembong memiliki potensi untuk dijadikan kawasan wisata bahari baik dari aspek fisik alam maupun dari aspek sosial dan budaya.

Dengan direalisasikannya pengembangan kawasan wisata bahari Muara Gembong, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muara Gembong pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Bekasi pada umumnya dengan menekan tingkat kebocoran devisa serta meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.

Dalam merealisasikan Muara Gembong sebagai kawasan wisata bahari, selain didukung oleh kelengkapan fasilitas sesuai dengan standarisasi fasilitas pembangunan pariwisata, juga perlu didukung oleh peran serta aktif masyarakat Muara Gembong pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Bekasi pada umumnya agar terwujudnya brand image kepariwisataan Kabupaten Bekasi sebagai kawasan wisata industri dan bahari.

6.2 Implikasi

Untuk Pemerintah (baik Pusat dan Daerah):

Penyelesaian atas sengketa tanah antara berbagai pihak yang berwenang (Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perum Perhutani dan masyarakat) merupakan persoalan penting yang perlu diselesaikan secara tuntas dengan penuh kearifan yang berlandaskan kepada *Win-win Solution* dengan tidak mengenyampingkan peraturan dan peruntukan lahan yang sudah terbangun.

Perbaiki sarana dan prasarana berupa jalan Negara yang kondisinya rusak parah sebagai akses utama dari wilayah daratan, juga penambahan sarana transportasi untuk mencapai Muara Gembong.

Menyusun *master plan* pengembangan kawasan wisata bahari Muara Gembong dan Sungai Citarum yang melintasi beberapa desa di Muara Gembong. Pembiayaan dibebankan kepada APBD I Propinsi Jawa Barat.